BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - TATA KELOLA RSUD TELUK KERAMAT 2026

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 20, BD 2026/NO. 20, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KERAMAT

Abstrak **:**

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Keramat;
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
  1. Pengaturan pola tata kelola BLUD RSUD Teluk Keramat meliputi kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia;
  2. Pemberian fleksibilitas pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, produktivitas, dan praktik bisnis yang sehat;
  3. Pengelompokan fungsi organisasi meliputi fungsi administrasi tata usaha, pelayanan kesehatan medis/keperawatan, pelayanan penunjang, kelompok jabatan fungsional, dan 8 komite rumah sakit;
  4. Kedudukan dan wewenang Pejabat Pengelola (Pemimpin/Direktur, Pejabat Keuangan/Kasubbag TU, dan Pejabat Teknis/Kasi Pelayanan), serta Pembina Teknis, Pembina Keuangan, dan Satuan Pengawas Internal (SPI);
  5. Mekanisme pengadaan, hak, kewajiban, evaluasi kinerja, dan disiplin tenaga profesional lainnya yang diangkat dengan perjanjian kerja.

Catatan **:**

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2026 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2026;
- Mencabut Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Pratama Teluk Keramat Kabupaten Sambas.